

**LAPORAN
RISET PENGEMBANGAN & PENERAPAN (RPP)**



**JUDUL PENELITIAN
MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA SEMARANG
DI ERA GLOBALISASI MELALUI DIPLOMASI LOKAL**

Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun

TIM PENELITIAN:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si | 0022046308 |
| 2. | Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. | 0001078702 |
| 3. | Mohamad Rosyidin, S.Sos., MA | 0003078501 |

Dibiayai dengan Sumber Dana:
Selain APBN LPPM RKAT Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2018

Halaman Pengesahan Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP)

1. a. Judul Penelitian : Memperkuat Lokalitas Kota Semarang melalui Diplomasi Lokal
- b. Bidang Penelitian : Ilmu Hubungan Internasional
2. Lama Penelitian : 8 bulan
3. Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si.
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. Gol/Pangkat/NIP : 3c/196304221989032001
 d. Fungsional : Lektor
 e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/S1-Hubungan Internasional
 f. Pusat Penelitian : LPPM
4. Alamat Ketua Peneliti
 a. Alamat kantor/Telp/Fax/Email : Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang
 Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01,
 b. Alamat rumah/Telp/Fax/Email : Bulusan, Tembalang, Kota Semarang.
 Telp. 024 76482700
5. Anggota Peneliti : 1. Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. –
 : 0001078702
 : 2. Mohamad Rosyidin, S.Sos, M.A - 0003078501
6. Pembiayaan
 a. Tahun pertama : Rp. 40.000.000
 b. Tahun kedua : Rp. 40.000.000
 c. Tahun ketiga : Rp. 45.000.000

Semarang, 24 September 2018

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Dr. Sunarto, M.Si
NIP. 19660727 199203 1 001

Dra. Rr. Hermeni Susiatingsih, M.Si
NIP. 19630422 198903 2 001

Menyetujui Ketua
LPPM Universitas
Diponegoro

Prof. Dr. Rer. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | 4 |
| BAB I..... | 5 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Urgensi Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 15 |
| BAB II..... | 20 |
| 2.1 Kelemahan Paradiplomasi Kota Semarang | 20 |
| 2.2 Potensi Lokalitas Kota Semarang..... | 24 |
| 2.3 Pentingnya Kerjasama Internasional atau Paradiplomasi Kota Semarang | 25 |
| BAB III..... | 30 |
| 3.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Paradiplomasi..... | 30 |
| 3.2 Alur Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Paradiplomasi | 31 |
| 3.3 Pentingnya Pemerintah Pusat dalam Efektivitas Paradiplomasi..... | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 35 |
| LAMPIRAN..... | 39 |

ABSTRAK

Globalisasi sebagai dimensi terbuka memberikan jalan bagi interaksi tak terbatas antar area yang berujung pada interaksi lokalitas. Lokalitas sendiri pada dasarnya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai identitas yang unik. Untuk menjembatani interaksi lokalitas tersebut, dibentuklah model paradiplomasi berupa *sister city*. *Sister city* adalah hubungan kerjasama yang dirintis berdasarkan kesamaan antara dua kota. Kerjasama *sister city* menjadi peluang serta ancaman bagi lokalitas suatu kota, dimana kedua kota akan menunjukkan bagaimana lokalitas masing-masing mendefinisikan hubungan kerjasama di antara keduanya. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan, atau R & D, yang terdiri atas 3 (tiga) tahap: Tahap pertama adalah tahap analisis kebutuhan akan paradiplomasi berbasis lokalitas. Tahap ke-dua adalah identifikasi kerjasama *sister city* yang sudah dilakukan Kota Semarang dan menganalisis kelemahan dari *sister city* yang sudah ada tersebut. Tahap ke-tiga, mengeksplorasi model kerja sama *sister city* yang *feasible* dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang. Penelitian ini telah memasuki tahap ke-tiga, yakni mencari kerjasama *sister city* yang dapat diterapkan di Kota Semarang, sehingga berkontribusi tidak hanya pada pembangunan daerah, tetapi juga pembangunan nasional.

Kata kunci: lokalitas, paradiplomasi, *sister city*

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I menyajikan konteks yang melandasi pelaksanaan penelitian ini. Target penelitian ini adalah menghasilkan model kerja sama *sister city*, yang dapat memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi ini. Untuk itu, pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, tujuan khusus penelitian, dan urgensi penelitian.

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, mendorong desentralisasi dalam praktik diplomasi. Penelitian Tahap I menunjukkan bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”, yang antara lain bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra baik kota, baik di level nasional maupun internasional, guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran (Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem’Biz (Semarang Business Forum). Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem’Biz tidak hanya menjadi forum promosi investasi di Kota Semarang saja, tetapi juga mengajak kawasan *hinterland* yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional. Berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya

konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan. Dengan kata lain, “*subnational foreign affairs*”, “*subnational foreign policy*”, “*sub-state diplomacy*”, “*multi-layered diplomacy*”, “*constituent diplomacy*”, “*local diplomacy*”, “*local foreign policy*”, “*regional diplomacy*”, “*plurinational diplomacy*”, “*post-diplomacy*”, “*micro diplomacy*”, “*foreign policy localization*”, “*catalytic diplomacy*”, hingga “*paradiplomacy*” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015) yang ditemukan dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada fenomena yang sama.

Implementasi dari paradiplomasi adalah penerapan kerja sama antar kawasan berupa *sister city*. *Sister city* adalah bentuk kerja sama intens yang dirintis oleh dua kota yang memiliki ciri khas kesamaan tertentu, biasanya berupa kesamaan demografi penduduk, latar belakang budaya, pengembangan potensi ekonomi dan lain-lain. *Sister city* menjadi media aplikasi paling ideal dari paradiplomasi karena memberikan ruang bagi kedua pihak untuk bekerjasama berdasarkan persamaan lokalitas. Penelitian Tahap II menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang juga melakukan aktivitas paradiplomasi melalui kerja sama *sister city*. Kerja sama tersebut tidak hanya terbatas dengan negara-negara di Asia Tenggara saja, namun juga Asia Timur, Eurasia, hingga Eropa bagian Timur. Ada sedikitnya delapan kerja sama *sister city* yang masih aktif hingga saat ini, yakni dengan Brisbane, Australia; Beihai, Tiongkok; Griffith University, Australia; Split, Korasia; Fuzhou, Tiongkok; Nanjing, Tiongkok; Dewan Perairan Daerah Schieland dan Krimpenerwaard, Belanda; serta Ulsan, Korea Selatan. Masing-masing *sister city* di atas memiliki tujuan dan manfaat yang sedikit berbeda dengan yang lain. Namun demikian, mereka berangkat dari satu alasan besar, yaitu kemiripan. Mengasumsikan satu kota memiliki sejumlah kemiripan dengan kota lain merupakan tahap dini untuk memulai proses diplomasi dalam bentuk *sister city*. Kemiripan ini tidak terbatas pada hal-hal materiil seperti tata ruang, tetapi juga yang sifatnya abstrak, misalnya budaya.

Penelitian Tahap I berhasil menunjukkan perdagangan sebagai potensi Kota Semarang. Hal ini dapat diperkuat dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010-2015, yakni “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Pemerintah Kota Semarang melalui Sem’Biz melakukan diplomasi lokal dalam rangka mengenalkan Kota Semarang sebagai kota perdagangan. Lebih lanjut, visi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang terpilih adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Penelitian tahap II menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang juga berupaya memanfaatkan globalisasi dengan menjalin kerja sama internasional melalui kerja sama *sister city*. Meski demikian, skema kerja sama yang telah disepakati tersebut mayoritas masih berhenti di tahap seremonial.

Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi, dapat kita sepakati bahwa pelaksanaan *sister city* membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota. Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang dimiliki oleh kota yang menjadi *partner*. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota yang menjalin kerja sama *sister city* untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi lokalitas masing-masing, serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun dalam bingkai kerja sama *sister city*. Hasil penelitian Tahap I dan Tahap II belum menjawab kerja sama *sister city* dapat diterapkan (*feasible*) bagi Kota Semarang dalam memperkuat lokalitasnya di era globalisasi. Penelitian tahap terakhir ini bertujuan untuk mengeksplorasi model *sister city* yang dapat dilakukan oleh Kota Semarang, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi pembangunan daerah, tetapi juga pembangunan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana model *sister city* yang dapat diterapkan (*feasible*) Kota Semarang dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian tahap ke-tiga ini bertujuan untuk mencari model *sister city* yang dapat dilakukan Kota Semarang dalam memperkuat lokalitasnya di era globalisasi. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang lokalitas Kota Semarang;
- b. Untuk mengidentifikasi paradiplomasi yang telah dijalankan Pemerintah Kota Semarang;
- c. Untuk mengeksplorasi kemungkinan model kerja sama *sister city* yang dapat diterapkan (*feasible*) dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

1.4 Urgensi Penelitian

Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadikan penelitian ini penting untuk segera dilakukan. Pertama, batas yang makin kabur karena globalisasi mendesak setiap area

berupa negara atau kota untuk segera mendefinisikan lokalitas masing-masing. Kedua, lokalitas yang sudah teridentifikasi harus segera diperkuat melalui serangkaian proses diplomasi, salah satunya lewat proses paradiplomasi. Terakhir, *sister city* sebagai pengejawantahan praktik paradiplomasi perlu mendapat perlakuan khusus jika dipraktikkan, terutama di Kota Semarang, agar lokalitas yang ada dapat diperkuat dan menjadi dominan dalam proses kerja sama itu sendiri.

Keunikan penelitian ini terletak pada lokalitas dapat bersaing dan diperkuat lewat praktik paradiplomasi yang diimplementasikan dalam model *sister city*. Sebagai salah satu departemen di universitas negeri paling besar di Jawa Tengah, peran Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam membantu menyelesaikan permasalahan di akar rumput dengan berbasis riset sangat dibutuhkan.

Dengan adanya penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Diponegoro dan meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian sosial humaniora, yang sejalan dengan fokus bidang penelitian Universitas Diponegoro, yakni pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model diplomasi yang mampu menjaga lokalitas Semarang, serta menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kota Semarang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor hubungan internasional Muncul aktor-aktor lain di luar Negara, seperti *non-governmental organizations* (NGOs) dan perusahaan multinasional. Lebih lanjut, tren demokratisasi yang

membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari Daerah, sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Kemunculan Kota sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya desentralisasi. Tujuan desentralisasi menurut perspektif desentralisasi administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rondinelli (1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek pemerintah, maka Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi, sehingga Ruland memberikan definisi sebagai berikut: “*Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development*” (1992, 3).

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan

kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang. Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”.

Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga, berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong Rogier van der Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang tidak kalah penting, yakni Kota atau Lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran Kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang berjudul “*City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*”, keduanya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan *city diplomacy*, atau diplomasi lokal, atau paradiplomasi¹.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga negara tidak dapat disebut sebagai aktor dari diplomasi lokal, kecuali tergabung dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang seringkali diberi tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri kotanya.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu pada politik luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring dengan perubahan tujuan

¹ Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara bergantian.

politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota seakan berada pada rute yang sama, tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan untuk memperebutkan lahan yang sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm & Melissen, 2007, 12). Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya sendiri, dan aktor seperti Kota perlu terlibat.

Berangkat dari *self-interest* ini, Kota menjalin kerja sama dalam hubungan internasional, salah satunya melalui yang dikenal dengan *sister city*. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas diplomasi lokal didorong oleh *self-interest* suatu Kota. Aspek keamanan, pembangunan, ekonomi, kultural, atau pun peningkatan jaringan dan kerja sama, dapat dicapai dengan melakukan diplomasi.

Alexander S. Kuznetsov (2015) menjelaskan ada sedikitnya enam pertanyaan yang dapat diajukan untuk menganalisis paradiplomasi, termasuk *sister city*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hasil riset Kuznetsov berdasarkan pemikiran-pemikiran ahli paradiplomasi terdahulu di tahun 1980an dan 1990an, seperti Duchacek, Soldatos, Kincaid, Fry, Michelmann, dan lain sebagainya. Enam pertanyaan tersebut antara lain adalah: (1) Apa penyebab meningkatnya aktivitas paradiplomasi di wilayah yang akan dianalisis?; (2) Apa dasar hukum aktivitas diplomasi di negara tersebut?; (3) Apa motivasi utama pemerintah daerah di wilayah tersebut melakukan kerjasama internasional?; (4) Bagaimana sikap atau pandangan pemerintah pusat terhadap paradiplomasi?; (5) Bagaimana pelembagaan paradiplomasi di wilayah tersebut?; serta (6) Apa konsekuensi dari adanya aktivitas paradiplomasi terhadap pembangunan nasional?

Pertanyaan pertama, berkaitan dengan penyebab meningkatnya aktivitas paradiplomasi di suatu kawasan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya paradiplomasi dianalisis (Kuznetsov, 2015, 102). Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari segi eksternal maupun internal. Segi eksternal menyoroti aspek universal, seperti adanya globalisasi, regionalisasi, demokratisasi, ataupun fenomena memudarnya batas-batas *domestic policy* dan *foreign policy* dalam dunia internasional (Kuznetsov, 2015, 102-104). Sementara, dari segi internal, salah satu yang melatarbelakangi misalnya adalah adanya desentralisasi atau meningkatnya peran pemerintah daerah.

Pertanyaan kedua menyoroti dasar hukum aktivitas paradiplomasi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab, karena bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar hukum menjadi penting

untuk melihat kewenangan-kewenangan daerah, misalkan apakah memang pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian (*treaty-making*) dengan aktor asing.

Ketiga, dalam menganalisis paradiplomasi perlu ditelusuri pula apakah motivasi pemerintah daerah menjalin kerjasama internasional. Motivasi tersebut bisa berupa ekonomi, kultur, ataupun politik (Kuznetsov, 2015, 109). Jika tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari pasar global melalui interaksi dengan aktor asing, maka motivasi kerjasama internasional tersebut adalah ekonomi. Sementara, jika kerjasama internasional menekankan pada persamaan budaya dan bahasa, maka motivasinya adalah motivasi kultural. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek budaya adalah yang pertama kali dipertimbangkan dalam kerjasama internasional tersebut. Terakhir, motivasi politik, yaitu kerjasama internasional yang didorong oleh tujuan politik. Sebagai contoh, pemerintah daerah melakukan paradiplomasi untuk mendapat status otonom yang tinggi, atau bahkan di titik ekstrim, mencari dukungan untuk membentuk negara sendiri (*secessionism*).

Empat, penting pula untuk mengamati sikap pemerintah pusat akan paradiplomasi oleh pemerintah daerah ini. Berdasarkan pertanyaan ini, dapat ditemukan dua jawaban, yakni apakah paradiplomasi dipandang sebagai tantangan atau ancaman oleh pemerintah pusat, atau, paradiplomasi dianggap mampu membawa dampak positif secara nasional. Paradiplomasi akan dianggap sebagai ancaman apabila bertentangan dengan kepentingan nasional, karena egosentrisme dari Daerah, misalnya. Sebaliknya, sikap positif pemerintah terhadap paradiplomasi dapat dilihat dari adanya kerjasama antara Pusat dan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, atau mendukung Daerah menjalankan aktivitas paradiplomasi dan memandang paradiplomasi sebagai *supplementary source* dalam mencapai kepentingan nasional.

Pertanyaan kelima yaitu bagaimana pelembagaan paradiplomasi di wilayah tersebut. Beberapa hal yang dapat disoroti antara lain adalah ada tidaknya departemen atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam urusan kerjasama internasional di wilayah tersebut; kunjungan resmi internasional pemerintah daerah; partisipasi dalam berbagai *event* internasional, seperti eksebisi atau konferensi, yang diselenggarakan oleh negara lain; dan membuka kantor di negara lain, seperti *paraconsulate*. Pertanyaan ini selain berfungsi untuk melengkapi data kualitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan data kuantitatif, dengan menyoroti jumlah perjanjian internasional yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah, atau jumlah kunjungan internasional yang sudah dilakukan, jumlah keikutsertaan dalam forum internasional, dan lain sebagainya (Kuznetsov, 2015, 113).

Terakhir, adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apakah aktivitas paradiplomasi memberi manfaat atau dampak bagi pembangunan daerah dan nasional. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memperkuat hasil evaluasi paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Jika ditinjau dari segi kuantitas, Pemerintah Kota Semarang berhasil menambah jumlah kerja sama luar negeri Indonesia dengan skema *sister city*. Saat ini, ada sedikitnya delapan kerja sama internasional yang berhasil diinisiasi Pemerintah Kota Semarang. Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan budaya.

Di era globalisasi, kerja sama internasional menjadi suatu kebutuhan. Jumlah kerja sama *sister city* yang dimiliki Kota Semarang menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki keinginan untuk terlibat dalam hubungan internasional. Tetapi, perlu pengembangan model yang mampu memaksimalkan hasil dari kerja sama *sister city* yang sudah disusun dan disepakati tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Peneliti pada penelitian Tahap II, kelemahan di aspek kelembagaan menjadi salah satu alasan utama belum maksimalnya kerja sama internasional Pemerintah Kota Semarang. Sementara, lingkup bidang kerja sama Kota Semarang dengan kedelapan kota tersebut sangat variatif, dan berpotensi dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan hasil temuan penelitian tahun 2017, Pemerintah Kota Semarang belum memiliki lembaga yang mampu memaksimalkan kerja sama *sister city*. Sehingga, selama ini, tindak lanjut dari kerja sama internasional seringkali terbatas pada pertukaran kunjungan pejabat pemerintah dan pengusaha.

Tidak dapat dipungkiri, diplomasi berkaitan erat dengan komunikasi. Kemampuan Negara untuk mengkomunikasikan kebijakan luar negeri atau budayanya ke *international audiences* akan mempengaruhi *nation branding* negara tersebut. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat internasional yang tertarik dengan negara tersebut. Jian Wang (2005) menjelaskan bahwa, permasalahannya, “... *one of the salient issues facing public diplomatic communication is the messenger problem*” (Wang, 2015, 33). Artinya, tidak semua negara memiliki kredibilitas yang baik dalam melakukan komunikasi tersebut, sehingga komunikasi atau informasi tidak dapat tersampaikan dengan efektif atau bahkan menjadi tidak produktif. Menyadari pentingnya peran aktor *sub-national* dalam membentuk *nation branding* di era globalisasi ini, mendorong Wang (2015) untuk membahas komunikasi yang efektif di level lokal.

Wang (2015) menjelaskan bahwa ada sedikitnya tiga peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni sponsor, koordinator, dan penghubung (*communicator*). Sebelumnya, ketiga peran ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya

desentralisasi, aktor daerah juga perlu didorong untuk mampu menjalankan tiga peran tersebut (Wang, 2015, 39). Dengan demikian, implementasi kerja sama menjadi lebih jelas, dan tidak akan terjadi *'sleeping agreements'*.

Sejalan dengan pemikiran Held dkk (1999), Wang tidak melihat pentingnya aktor *sub-national* ini kemudian menggeser peran Negara dalam diplomasi publik, dan membuat kekuatan (*power*) Negara hilang. Sebaliknya, pemerintah pusat berbagi kekuatan (*sharing power*) dengan pemerintah daerah, untuk memaksimalkan lokalitas (Wang, 2015, 35). *Sharing power* yang dimaksud di sini adalah tentunya terkait komunikasi. Untuk isu-isu yang bersifat *'low politics'*, dikomunikasikan oleh pemerintah daerah. Sementara, isu *'high politics'* seperti perang dan pertahanan, tetap menjadi porsi pemerintah pusat. Di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 11.

Peran pemerintah daerah sebagai sponsor, koordinator, dan penghubung digambarkan Wang melalui tiga skenario, yang digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi

| Skenario hubungan Pusat dan Daerah | Tipe peran | | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| | Sponsor | Koordinator | Penghubung |
| 1 | Daerah | Daerah | Daerah |
| 2 | Nasional | Daerah | Daerah |
| 3 | Nasional | Nasional | Daerah |

Sumber: diolah dari Wang (2015, 40)

Seperti yang disebutkan di atas, seiring dengan munculnya aktor-aktor baru selain Negara (pemerintah pusat), perlu kemudian dipertimbangkan pembagian kekuatan antara Pusat dan Daerah. Skenario I menempatkan Daerah sebagai aktor yang menggantikan Negara menjalankan ketiga peran diplomasi yang ada. Skenario II, Pusat hanya menginisiasi dan mensponsori program kerjasama, sementara manajemen proses diplomasi dan interaksi secara langsung diserahkan kepada Daerah. Program ini lebih banyak melibatkan pemerintah daerah, dimana koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak banyak diperlukan (Wang, 2015, 39). Skenario III, mengacu pada diplomasi yang membutuhkan dukungan Pusat dan koordinasi dengan Daerah untuk mengeksekusi program. Dalam hal ini, Pusat memegang peranan penting dalam mengembangkan konsep program dan terikat melihat program bagaimana tersebut dijalankan atau direalisasikan (Wang, 2015, 40). Artinya, Daerah berperan dalam membuat jaringan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional;

menjadi penghubung secara langsung. Sementara, Pusat memiliki peran untuk mendukung dan menjadi fasilitator, sehingga program dirancang dapat dijalankan dengan baik oleh Daerah.

Beberapa negara bagian memiliki kondisi geografis yang terlalu besar, dengan berbagai permasalahan, sehingga perlu kebijakan luar negerinya sendiri. Terkait hal tersebut, sebagian daerah memilih membuat peraturan daerah terkait hubungan internasional, sementara beberapa lainnya bahkan memutuskan untuk mendirikan *paraconsulate* di negara lain (Mathews, 1996, 61). Apapun keputusan yang dibuat Daerah, harus tetap sejalan dengan landasan hubungan internasional yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan undang-undang yang ada, pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan yang kemudian diambil oleh Pemerintah Indonesia, agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut (bappenas.go.id, 2009). Dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, maka model kerja sama *sister city* yang dapat diterapkan adalah di Kota Semarang adalah Skenario III, yang menempatkan Pusat sebagai sponsor dan koordinator, sementara Kota sebagai penghubung.

Sebagai aktor yang memahami lokalitas di daerahnya, Kota dapat melakukan diplomasi dengan Kota di negara lain yang memiliki kemiripan. Pemerintah Kota Semarang dapat menjadi penghubung Pemerintah Indonesia dengan Kota di negara lain, dalam bidang perdagangan. Sementara, Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, misalnya, berperan dalam mensponsori dan memfasilitasi diplomasi tersebut. Sehingga, aktivitas hubungan luar negeri Pemerintah Kota Semarang tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, dan meminimalisir adanya *'sleeping agreement'* di Kota Semarang. Lebih lanjut, hal ini dapat mendukung terealisirnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat.

1.6 Metode Penelitian

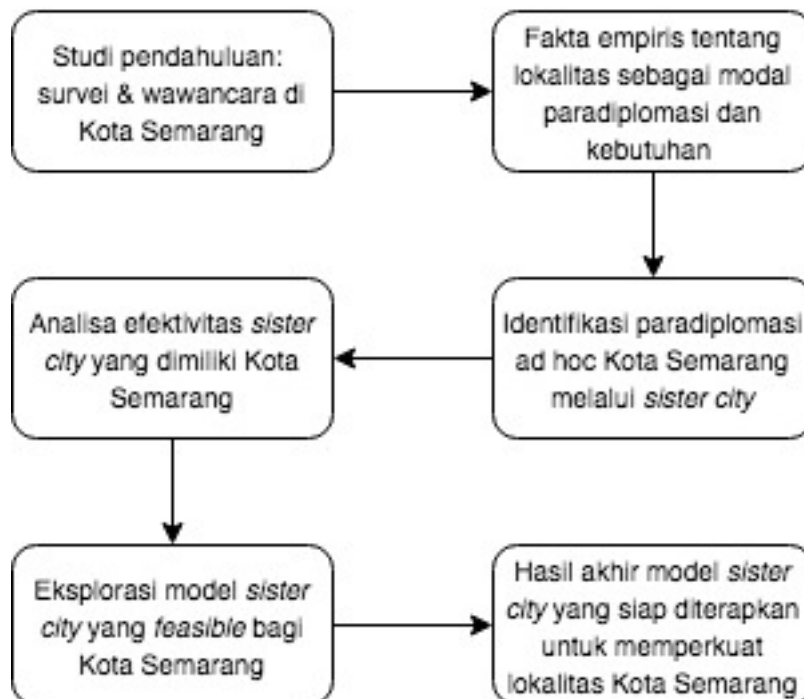
Berdasarkan sifat dan jenis masalah penelitian serta tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini dirancang untuk dilakukan dalam tiga tahap yang berkelanjutan, yaitu selama tiga tahun. Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-tiga.

1.6.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah bagian penelitian *multiyears*, yang rencananya akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Penelitian pada tahun pertama telah dilakukan dan berhasil melakukan pemetaan awal lokalitas Kota Semarang serta paradiplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menggandeng *partner* internasional maupun nasional. Hasil pemetaan ini berfungsi sebagai landasan penelitian tahun kedua, yang bertujuan untuk memetakan paradiplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk *sister city*, yang mana ingin diketahui efektifitasnya dalam memperkuat dan mempromosikan lokalitas. Hal ini menjadi landasan dalam mengembangkan model *sister city* yang *feasible* bagi Kota Semarang pada penelitian tahun ke-tiga ini.

Dengan penelitian yang bertahap, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis melalui pengembangan konsep paradiplomasi melalui model *sister city* yang secara khusus dibangun untuk memperkuat lokalitas di tengah gerusan arus utama globalisasi. Secara sederhana, gambaran prosedur pelaksanaan ketiga penelitian dapat dilihat pada Bagan 3.1 dan Tabel 3.2 berikut:

Bagan 1.1 Alur Penelitian



Tabel 1.1 Kegiatan Penelitian

| No. | Tahap | Kegiatan | Luaran Kegiatan (Indikator) |
|-----|--|--|---|
| 1. | Analisis kebutuhan | Survei tentang pengaruh globalisasi terhadap lokalitas Kota Semarang dan identifikasi lokalitas melalui wawancara dan observasi lapangan | - Gambaran tentang lokalitas Kota Semarang - Gambaran kebutuhan Kota Semarang - Publikasi |
| 2. | Efektivitas model paradiplomasi yang sudah ada | Identifikasi paradiplomasi ad hoc Kota Semarang: <i>sister city</i> | - Analisis efektivitas kerja sama - Publikasi |
| 3. | Usulan pengembangan model | 1. Uji pakar 2. Uji lapang terbatas 3. Uji lapang secara luas | - Model <i>sister city</i> yang <i>feasible</i> dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang - Publikasi |

Berdasarkan bagan dan tabel di atas, masalah penelitian yang telah dipecahkan pada **Tahap I** adalah bagaimana lokalitas Kota Semarang di era globalisasi saat ini, dan apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat potensi Kota Semarang. Kedua poin tersebut digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan paradiplomasi dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Semarang. Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian Tahap II.

Pada penelitian **Tahap II**, permasalahan yang akan ditangani adalah pemetaan dan evaluasi efektivitas kerja sama *sister city* di Kota Semarang, berdasarkan analisis kebutuhan yang telah diperoleh dari penelitian Tahap I. Sehingga, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak hanya dapat membantu memperkuat lokalitas, tetapi juga mempromosikan lokalitas di tengah era globalisasi.

Terakhir, pada penelitian **Tahap III**, akan dilakukan eksplorasi model *sister city* yang dapat diterapkan Kota Semarang. Rancangan penelitian yang digunakan pada tahap ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), yang di dalamnya terdapat uji pakar dan uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Terhadap kerangka kerja sama yang sudah direvisi berdasar penilaian penguji atau para ahli, akan

dilakukan uji lapang. Uji lapang ini terdiri atas uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Subyek pengguna terbatas adalah Pemerintah Kota Semarang itu sendiri, selaku pemangku kebijakan. Sedangkan untuk uji lapang secara luas akan dipilih tiga kelompok masyarakat yang berada di bawah kerangka kerja sama. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya kerangka kerja sama *sister city* sebagai upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tim peneliti merupakan subyek kunci dalam penelitian ini, yang bertugas mencari data terkait kerja sama *sister city* sebagai bagian dari paradiplomasi. Kedua, Kota Semarang, merupakan subyek untuk pengembangan paradiplomasi melalui *sister city*. Ketiga, pakar dalam bidang demokrasi-desentralistik dan paradiplomasi merupakan subyek yang dilibatkan dalam proses validasi kerja sama yang dihasilkan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang, utamanya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerja sama *sister city*. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai, b) mempersiapkan wawancara, c) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

BAB II

2.1 Kelemahan Paradiplomasi Kota Semarang

Paradiplomasi yang dilakukan Kota Semarang berbentuk *sister city* mampu menemukan lokalitas Kota Semarang menjadi identitas yang dominan dalam persaingan di era globalisasi. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki berbagai potensi sebagai bahan dasar melakukan aktivitas *sister city* dengan negara lain. Sejatinya *sister city* berbentuk kerjasama intens yang dirintis oleh dua kota yang memiliki kesamaan tertentu. Kesamaan tersebut dapat berupa demografi penduduk, latar belakang budaya, pengembangan potensi ekonomi, dan lain lain. *Sister city* merupakan aplikasi paling ideal dari paradiplomasi karena mampu memberikan ruang kepada dua pihak untuk berinteraksi secara dua dimensi. Dimensi pertama yaitu pertemuan kedua belah pihak yang melakukan *sister city*. Dimensi kedua yaitu persaingan lokalitas yang mampu menunjang dominasi lokalitas salah satu kota. Sehingga, pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat dalam *sister city* akan terus menunjukkan dan mengembangkan lokalitasnya menjadi paling dominan.

Melalui media *sister city* tersebut pemerintah Kota Semarang membuka skema kebijakan publik berbasis MICE (*meetings, incentives, conferences, and events*), dengan Sem'Biz (*Semarang Business Forum*) sebagai salah satu program pendukungnya. Sem'Biz mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis dan investasi. Mulai dari unsur pemerintah kota hingga kabupaten seperti instansi penanaman modal, investor, asosiasi pengusaha, lembaga keuangan, hingga BUMN dan BUMD. Pada akhirnya Sem'Biz tersebut menghasilkan Lol (*Letter of Intent*) sebagai bukti komitmen para aktor menanamkan modalnya di Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Lol merupakan kunci utama atau gerbang awal Kota Semarang melakukan aktivitas paradiplomasi berupa *sister city*. Secara sederhana *sister city* diawali dengan adanya kerjasama antarpemerintah kota atau daerah dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*). Dengan penandatanganan MoU tersebut maka kerjasama disahkan. Namun, sebelum kedua pihak menandatangani MoU, masing-masing pihak harus terlebih dahulu memiliki Lol dan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat. Lol berfungsi untuk meningkatkan itikad baik, persahabatan, pengertian, serta kerjasama saling menguntungkan antara kedua kota (kemlu.go.id, 2017).

Sejauh ini Kota Semarang telah melakukan kerjasama *sister city* dengan beberapa kota di dunia antara lain Brisbane, Australia; Nanjing, Republik Rakyat Cina Fuzhou,

Republik Rakyat Cina; Jung-gu, Korea Selatan; dan Hanoi, Republik Sosialis Vietnam. Kelima kerjasama *sister city* tersebut dimulai tidak lain karena adanya kemiripan karakter antar kedua belah pihak. Berawal dari kemiripan karakter yang bersifat material berupa penduduk dan wilayah berkembang menjadi kemiripan abstrak seperti budaya. Kemiripan yang kuat tersebut mendasi fondasi awal adanya kerjasama *sister city* antarkota tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu aktivitas kerjasama *sister city* Kota Semarang dengan berbagai kota di dunia tersebut tidak menunjukkan langkah keberlanjutan. Berbagai faktor melandasi dinamika kerjasama *sister city* Kota Semarang dengan berbagai kota diantaranya kendala birokrasi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama.

Kendala-kendala yang menjadikan kelemahan paradiplomasi muncul terutama dari aspek birokrasi Kota Semarang. Kota Semarang yang merupakan kota kelima terbesar di Indonesia memiliki birokrasi yang lemah terutama sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Berbagai kerjasama *sister city* berakhir tanpa perkembangan akibat kurangnya kualitas tenaga ahli Kota Semarang. Ketidakmampuan pegawai birokrasi Kota Semarang dalam menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris menjadi kendala terbesar *sister city* sulit berkembang. Akibat tidak mampunya pegawai pemerintahan berbahasa Inggris maka substansi dan penulisan naskah kerjasama menjadi tidak efektif (Putri, 2017). Selain itu keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi permasalahan tersendiri karena hanya sedikit pegawai atau *staff* pelaksana kerjasama luar negeri yang dimiliki Kota Semarang.

Selain itu, pada birokrasi juga terdapat prosedur yang menghambat kerjasama luar negeri khususnya *sister city* di Kota Semarang seperti pembatasan personil dalam pelaksanaan kunjungan ke luar negeri (maksimal lima orang) dan batasan waktu maksimal tujuh hari. Dengan batas waktu dan personil tersebut menyulitkan pemerintah dalam proses observasi perkembangan kerjasama *sister city*. Selain itu, sulitnya koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kendala tersendiri karena pemerintah daerah tidak mendapat asistensi atau pendampingan dalam melaksanakan kerjasama *sister city*. Pemerintah kota dibiarkan berjalan sendiri dengan sumber daya yang dimiliki, padahal dalam praktiknya sangat perlu adanya koordinasi berupa perizinan hingga pendampingan.

Selain kelemahan birokrasi dan prosedural yang dimiliki Kota Semarang, keterlibatan aktor *non-government* juga menghambat perkembangan dan keberlanjutan *sister city*. Kerjasama yang dilakukan Kota Semarang yang berfokus pada kerjasama investasi perdagangan dan industri melibatkan aktor-aktor non pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* dalam kerjasama *sister city*. Perlu adanya koordinasi yang intens antara

pemerintah dan aktor non pemerintah guna mengontrol jalannya kerjasama terutama pada kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Berbagai kelemahan tersebut akhirnya menjadikan kerjasama *sister city* yang dilakukan Kota Semarang dengan berbagai kota di dunia terhambat dan kurang berkembang, selain karena birokrasi yang tidak memadai, inisiatif pemerintah dalam melakukan implementasi kerjasama dinilai kurang sehingga tidak terjadinya keseimbangan dalam bekerjasama.

2.1.1 Brisbane, Australia

Kota Brisbane ibu kota Queensland, Australia merupakan kota terpadat ketiga di Australia. Kota Brisbane memiliki ciri khas bangunan yang tersebar merata hingga sudut kota, selain itu daya tarik Sungai Brisbane merupakan pesona tersendiri dari kota ini. Ternyata, fitur-fitur tersebut juga dimiliki Kota Semarang. Dari mulai populasi Kota Semarang yang merupakan kota terpadat kelima di Indonesia. Corak bangunan yang tidak semuanya merupakan bangunan kontemporer namun terdapat berbagai bangunan bernilai historis merupakan kemiripan antar kedua kota. Atas dasar kemiripan-kemiripan tersebut terjalinlah kerjasama *sister city*.

Kerjasama *sister city* kedua kota dimulai sejak 1993 yang merupakan kerjasama *sister city* pertama di Kota Semarang. Terdapat berbagai pertimbangan dasar mengapa kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dan Kota Brisbane terjalin yaitu pertama, Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah. Kedua, Semarang merupakan pusat pemerintahan daerah, industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Ketiga, letak Kota Semarang yang berada di pantai utara Pulau Jawa. Keempat, jumlah populasi Kota Semarang beserta faktor klimatologis termasuk temperatur kota. Kelima, industri-industri besar di Kota Semarang seperti pertanian, perikanan, manufaktur yang disokong oleh adanya pelabuhan sebagai salah satu pusat distribusi barang di Indonesia (Brisbane City Council, 2016). Atas berbagai potensi dan kesamaan tersebut maka dibangunlah nota kesepahaman untuk membentuk kerjasama *sister city*.

Hubungan *sister city* ini kemudian mencakup ruang lingkup berikut: (1) ekonomi, perdagangan, dan investasi; (2) pembangunan, pariwisata, seni, dan budaya; (3) pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup; serta (4) pertukaran pegawai dan pertukaran budaya.

2.1.2 Fuzhou, Provinsi Fujian, RRT

Hubungan kerjasama antara kota Semarang dengan kota-kota Tiongkok telah terjalin cukup harmonis. Hal ini mengingat kedekatan sejarah yang dimiliki antara kota Semarang dengan Tiongkok. Alasan tersebut yang menyebabkan Fuzhou pada akhirnya menghendaki pembentukan *sister-city* dengan kota Semarang. Fuzhou merupakan ibu kota provinsi Fujian, Tiongkok yang berlokasi di pesisir Sungai Min dan berbatasan dengan Selat Taiwan. Fuzhou diproyeksikan menjadi salah satu kota pelabuhan yang akan mendukung program '*Maritime Silk Road*' yang dicanangkan pada pemerintahan Presiden Xi Jinping. Di sisi lain, kota Semarang juga terpilih menjadi salah satu port pelabuhan dalam proyek tol laut Jokowi. Oleh karena itu, menurut Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang yang menganggap bahwa kerjasama dengan Fuzhou akan menjadi momentum yang bagus bagi kota Semarang untuk dapat melibatkan diri dalam Belt and Road Initiative antara Indoensia dan Tiongkok (Asia Pacific Daily, 2016).

2.1.3 Nanjing, Provinsi Jiangu, RRT

Nanjing atau dulu dieja Nanking adalah ibu kota provinsi Jiangu di Republik Rakyat Tiongkok. Nanjing merupakan kota kedua terpenting di Tiongkok setelah Shanghai dan juga menjadi sebuah kota wisata terkenal dengan banyak tempat bersejarah. Pemerintah kota Nanjing telah berhasil untuk memaksimalkan unsur kuno dan sejarah sehingga menjadikannya salah satu circumvallation kuno terbesar di dunia. Sedikitnya telah terdapat 14 tempat wisata bersejarah di kota tersebut. Alasan inilah yang mengakibatkan kota Semarang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kota Nanjing yang dipandang telah berhasil melakukan pengelolaan pariwisatanya dengan baik. Pemerintah kota Semarang merasa perlu mencontoh model pengelolaan pariwisata dari kota Nanjing mengingat kota Semarang juga memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Oktober 2016 telah disepakati pembentukan *sister city* antara kota Semarang dengan Nanjing. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ibu Heverina G. Rahayu selaku Wakil Walikota Semarang dan Mr. Miao Ruillin selaku Walikota Nanjing. Kemudian di bulan yang sama, delegasi kota Semarang yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Semarang, Heverina G. Rahayu melakukan kunjungan ke kota Nanjing sekaligus untuk menghadiri undangan Nanjing World Historical and Cultural Cities Expo 2016.

Namun, kerjasama *sister city* dengan beberapa kota di berbagai negara tersebut kebanyakan hanya bersifat formalitas politik tanpa realisasi berbentuk material. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat membuat pemerintah Kota Semarang bekerja sendirian untuk terus berupaya melaksanakan paradiplomasi dengan berbagai negara. Selain itu,

asistensi yang kurang dari pemerintah pusat menyebabkan tidak terwujudnya proyek kerjasama kreatif sehingga kerjasama berhenti pada tahap konsep dan politis.

2.2 Potensi Lokalitas Kota Semarang

Kota Semarang yang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan memiliki kekuatan geostrategis sebagai ibukota Jawa Tengah. Kota Semarang berada pada jalur strategis secara ekonomi karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan Pulau Jawa. Selain itu dalam hal transportasi darat, Kota Semarang tak kalah unggul dengan memiliki jalur kereta api dan bandara internasional yang merupakan nilai tawar tersendiri. Kemajemukan suku bangsa di Kota Semarang yang terdiri dari suku Jawa, Chinese, dan Arab yang tersebar di berbagai penjuru Semarang merupakan daya tarik tersendiri disokong oleh peninggalan-peninggalan bersejarah. Kota Semarang juga dikenal sebagai kota toleransi dengan berbagai akulturasi agama dan budaya yang tersimpan di dalamnya seperti candi hindu, masjid, vihara budha, dan klenteng.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya Kota Semarang semakin dianggap penting dan diperhitungkan di kancah domestik dan internasional. Berbagai karakter tersebut selanjutnya dipandang sebagai lokalitas atau unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakan Kota Semarang dengan kota lainnya. Lokalitas Kota Semarang tersebut tidak hanya berupa material namun selanjutnya dapat berinteraksi dan berpengaruh pada unsur dinamis seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Dengan kekayaan aspek sosial-budaya, dan geografis tersebut membuat pemerintah Kota Semarang berkonsentrasi pada pengembangan perdagangan, jasa, dan industri. Ketiga bidang tersebut sangat logis menjadi fokus utama saat ini karena dinilai Kota Semarang sangat kurang dalam hal pengembangan industri karena keterbatasan wilayah. Saat ini industri dan perdagangan hanya difokuskan pada *hinterland* Kota Semarang yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Wilayah Kota Semarang sendiri saat ini hanya difungsikan pada pusat administrasi dan bisnis. Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat

kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.



Gambar 2.1 Peta Jawa Tengah

Kota Semarang

Kawasan Industri atau Hinterland

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang.

2.3 Pentingnya Kerjasama Internasional atau Paradiplomasi Kota Semarang

Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi, dapat kemudian disepakati bahwa pelaksanaan *sister city* membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota.

Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang dimiliki oleh kota yang menjadi *partner*. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota yang menjalin kerja sama *sister city* untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi lokalitas masing-masing, serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun dalam bingkai kerja sama *sister city*.

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Paradiplomasi memberikan perhatian khusus di mana lokalitas tertentu mampu tampil menjadi dominan dalam persaingan yang terjadi dalam dimensi globalisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap lokalitas memiliki ciri unik masing-masing. Dengan menggunakan paradiplomasi sebagai sarana utama, suatu lokalitas dapat menjadi dominan dan menjadi agen globalisasi di mana area lain akan terpengaruh dan beradaptasi pada kekhasan dari lokalitas tersebut.

Kota Semarang tahun 2016-2021 memiliki beberapa misi, yaitu: mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas, mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kota metropolis yang dinamis dan berwawasan lingkungan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Kota Semarang memiliki Sapta Program dalam Fokus Pembangunannya. Sapta Program tersebut mencakup beberapa hal yaitu: penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penanganan rob dan banjir, peningkatan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan pelayanan pendidikan, serta peningkatan pelayanan kesehatan (Pemerintah Kota Semarang, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, Semarang dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota nya juga memiliki sasaran untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pengendalian kerjasama antar daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, serta dengan pihak ketiga (Bappeda Semarang, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari Kota Semarang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sebagai salah satu cara untuk mewujudkan misi-misi tersebut. Misi-misi Kota Semarang tersebut juga

menunjukkan bahwa Kota Semarang, tidak dapat dipungkiri, memiliki *self-interest* yang ingin diwujudkan.

Kerjasama internasional atau paradiplomasi melalui program *sister city* dapat digunakan oleh Kota Semarang sebagai media yang tepat. Selain untuk mencapai kepentingan-kepentingan atau *self-interest* tersebut, melalui paradiplomasi, Kota Semarang dapat menambah *value* atau nilai terhadap Kota Semarang itu sendiri. Dengan paradiplomasi dan *sister city*, Kota Semarang dapat menyatukan serta memperkuat hubungan-hubungan yang sudah terjalin dengan negara lain. Selain itu, salah satu yang perlu digarisbawahi adalah adanya pertukaran informasi yang terjadi dalam *sister city*. Melalui pertukaran informasi tersebut, tentunya Kota Semarang dapat mendapatkan manfaatnya. Contohnya adalah adanya pertukaran informasi mengenai bagaimana suatu kota membangun daerahnya, bagaimana usaha kota yang bersangkutan dalam menyejahterakan masyarakatnya, dan informasi lain yang kemudian dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, informasi yang didapatkan tentu saja akurat dan terjamin karena didapatkan dari sumber yang utama atau dapat dikatakan sebagai data primer.

Adanya pertukaran servis atau layanan juga merupakan salah satu keuntungan dari paradiplomasi. Beberapa kerjasama yang sudah dilakukan oleh Kota Semarang adalah kerjasama teknis dengan Danida (Kerajaan Denmark) dan Kota Toyama, Jepang. Danida memberikan bantuannya kepada Kota Semarang dalam bentuk kerjasama Pengelolaan Sampah *Landfill Gas* di TPA Jatibarang (Bappeda Kota Semarang, 2018). Permasalahan sampah di TPA Jatibarang sudah lama menjadi perhatian di Kota Semarang karena banyak limbah dan sampah yang tidak tertangani dengan baik sehingga berdampak pada polusi dan pencemaran lingkungan. Kerjasama dengan Danida membantu Kota Semarang dalam mengelola sampah tersebut menjadi energi terbarukan (EBT) melalui proyek percontohan *Environment Support Programme Phase 3 (ESP3)*. Akan dibangun pula pembangkit listrik berdaya 1,2 MW dengan bahan bakar gas metana dari sampah di TPA Jatibarang.

Selain itu, kerjasama di bidang teknologi dengan Kota Toyama juga memberikan keuntungan bagi Kota Semarang. Kota Toyama sepakat melakukan kerjasama dalam usaha bidang energi terbarukan dan pengurangan emisi rumah kaca. Peralihan bahan bakar BRT Trans Semarang yang semula adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi gas juga termasuk dalam kerjasama tersebut. Kerjasama *sister city* Kota Semarang dengan Danida dan Kota Toyama membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan salah satu misi Kota Semarang yaitu untuk mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang dimiliki Kota Semarang masih

terbatas, ditambah dengan besarnya dana yang diperlukan menyebabkan banyak penyelesaian permasalahan Kota Semarang terhambat. Melalui kerjasama *sister city*, permasalahan tersebut terbukti mulai terselesaikan sedikit demi sedikit.

Kerjasama *sister city* dengan Kota Toyama juga memberikan manfaat bagi Kota Semarang dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program-program dicanangkan agar masyarakat Semarang dapat melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang berada di Toyama, kemudian agar siswa di Semarang dapat melakukan *study tour* di Kota Toyama. Kedua hal tersebut mendukung salah satu Sapta Program Kota Semarang yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan.

Program *sister city* yang terjalin antara Kota Semarang dan wilayah lain juga membuka pintu perdagangan bagi sektor industri di Kota Semarang mengingat Kota Semarang memiliki potensi yang cukup besar di bidang perdagangan dengan banyaknya kawasan industri yang berkembang di Kota Semarang. Ini juga menonjolkan potensi lokal Kota Semarang yang berdiri dan berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan yang berbasis pada MICE, dengan Sem'Biz sebagai salah satu program pendukungnya. Ketika pintu perdagangan sudah terbuka, maka hal tersebut tentunya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang. Begitu pula dalam sektor budaya, akan terjadi pertukaran budaya antara Semarang dengan *partner* dalam program *sister city* nya. Pertukaran budaya tersebut akan memperkenalkan Kota Semarang lebih luas lagi di kancah internasional yang akan menambah daya tarik pariwisata Kota Semarang.

Selain *sister city*, kerjasama yang dilakukan Kota Semarang dengan lembaga-lembaga asing juga memberikan manfaat tersendiri bagi Kota Semarang. Salah satunya adalah kerjasama dengan Bank Dunia yang telah diwujudkan dalam program *City Planning Labs* (CPL) untuk memperkuat perencanaan kota. Program tersebut membantu Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas teknisnya untuk menghasilkan dan menganalisa data geospasial melalui sistem *digital*. Kerjasama internasional dengan berbagai kota dan lembaga, serta peradiplomasi melalui program *sister city* dapat membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan kepentingan-kepentingannya, visi dan misinya, serta target-target yang sudah dicanangkan dalam upaya memajukan Kota Semarang. Kota Semarang dapat mendapatkan informasi, servis, teknologi, dana maupun jasa dari *partner sister city* tersebut yang dapat digunakan untuk membangun Semarang. Adanya kerjasama internasional dan peradiplomasi melalui program *sister city* juga terbukti dapat menambah nilai atau *value* dari Kota Semarang. Semakin bertambahnya nilai dari

Kota Semarang akan semakin menambah daya saing Kota Semarang di mata internasional. Saat Kota Semarang memiliki daya saing yang tinggi di mata internasional, maka akan menarik kota-kota lain dan investor untuk bekerjasama dengan Kota Semarang yang merupakan suatu keuntungan dan kesempatan bagi Kota Semarang untuk mewujudkan visi dan misinya. Hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi Kota Semarang untuk memperkuat dan menambah potensinya di bidang perdagangan. Memiliki hubungan yang baik dengan kota-kota lain juga dapat memberi manfaat bagi Kota Semarang di bidang politik.

Melihat keuntungan dan manfaat yang telah didapat oleh Kota Semarang melalui *sister city*, maka pentingnya kerjasama internasional dan paradiplomasi bagi Kota Semarang merupakan cara yang cukup efektif untuk mewujudkan *interest* dari Kota Semarang. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan dalam sistematika *sister city* Kota Semarang sehingga program tersebut dalam terlaksana secara lebih baik dan lebih efektif.

BAB III

3.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Paradiplomasi

Globalisasi menyebabkan pergeseran isu hubungan internasional yang pada awalnya fokus pada isu *high politics* dengan mengedepankan perihal material menjadi fokus pada isu kerjasama melalui jalur diplomasi. Diplomasi pada awalnya bersifat tradisional dengan negara menjadi aktor utama dalam diplomasi. Namun, di era modern seiring meningkatnya kebutuhan negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam rangka kesejahteraan warga negaranya, diplomasi dijalankan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Globalisasi menyebabkan pola diplomasi yang mulanya diplomasi tingkat tinggi menjadi *non-central government* yang berarti aktor diplomasi berada pada pemerintah daerah atau dikenal dengan paradiplomasi (Mukti, 2013).

Indonesia dalam menjalankan diplomasinya fokus pada pengembangan bidang industri, perdagangan, teknologi, dan lain lain. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah pusat melakukan penyerapan modal asing yang diarahkan kepada daerah dengan potensi yang sesuai. Sumber daya alam yang dimiliki daerah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan apabila dana investasi diarahkan langsung kepada pemerintah daerah sebagai *stakeholder* paradiplomasi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih maksimal mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam rangka meningkatkan pembangunan. Hal itu juga sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan perekonomian rakyat. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dalam rangka membangun pembangunan di daerah (Imawan, 2006).

Wang (2015) menjelaskan bahwa ada sedikitnya tiga peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni sponsor, koordinator, dan penghubung (*communicator*). Sebelumnya, ketiga peran ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, aktor daerah juga perlu didorong untuk mampu menjalankan tiga peran tersebut (Wang, 2015, 39). Dengan demikian, implementasi kerja sama menjadi lebih jelas, dan tidak akan terjadi '*sleeping agreements*'. Sejalan dengan pemikiran Held dkk (1999), Wang tidak melihat pentingnya aktor sub-national ini kemudian menggeser peran Negara dalam diplomasi publik, dan membuat kekuatan (*power*) Negara hilang. Sebaliknya, pemerintah pusat berbagi kekuatan (*sharing power*) dengan pemerintah daerah, untuk memaksimalkan lokalitas (Wang, 2015, 35). *Sharing power* yang dimaksud di sini adalah

tentunya terkait komunikasi. Untuk isu-isu yang bersifat *'low politics'*, dikomunikasikan oleh pemerintah daerah. Sementara, isu *'high politics'* seperti perang dan pertahanan, tetap menjadi porsi pemerintah pusat.

Peran pemerintah daerah sebagai sponsor, koordinator, dan penghubung digambarkan Wang melalui tiga skenario, yang digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 3.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi

| Skenario hubungan Pusat dan Daerah | Tipe peran | | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| | Sponsor | Koordinator | Penghubung |
| 1 | Daerah | Daerah | Daerah |
| 2 | Nasional | Daerah | Daerah |
| 3 | Nasional | Nasional | Daerah |

Sumber: diolah dari Wang (2015, 40)

Seperti yang disebutkan di atas, seiring dengan munculnya aktor-aktor baru selain Negara (pemerintah pusat), perlu kemudian dipertimbangkan pembagian kekuatan antara Pusat dan Daerah. Skenario I menempatkan Daerah sebagai aktor yang menggantikan Negara menjalankan ketiga peran diplomasi yang ada. Skenario II, Pusat hanya menginisiasi dan mensponsori program kerjasama, sementara manajemen proses diplomasi dan interaksi secara langsung diserahkan kepada Daerah. Program ini lebih banyak melibatkan pemerintah daerah, dimana koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak banyak diperlukan (Wang, 2015, 39). Skenario III, mengacu pada diplomasi yang membutuhkan dukungan Pusat dan koordinasi dengan Daerah untuk mengeksekusi program. Dalam hal ini, Pusat memegang peranan penting dalam mengembangkan konsep program dan terikat melihat program bagaimana tersebut dijalankan atau direalisasikan (Wang, 2015, 40). Artinya, Daerah berperan dalam membuat jaringan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional; menjadi penghubung secara langsung. Sementara, Pusat memiliki peran untuk mendukung dan menjadi fasilitator, sehingga program dirancang dapat dijalankan dengan baik oleh Daerah.

3.2 Alur Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Paradiplomasi

Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan mengenai kerjasama luar negeri yang dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 mengenai kerjasama daerah. Kerjasama daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Otonomi Daerah yang membawahi Sub-

bagian Kerjasama Antarlembaga. Munculnya peraturan pemerintah tersebut sebagai wujud sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang digunakan Indonesia dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kemungkinan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak asing, meskipun belum dalam bentuk aturan hukum yang kokoh karena bukan berbentuk Undang-Undang, namun masih dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri, yakni Permendagri No 1 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri di jajaran Kementerian Dalam Negeri.

Dalam menjalankan aktivitas paradiplomasi, terdapat berbagai prosedur yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut lebih lanjut berupa pendanaan kegiatan paradiplomasi atau *sister city* pemerintah daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme tersebut yaitu:

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperoleh sponsor dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dinilai sangat mengenal potensi daerahnya beserta permasalahan yang dihadapi sehingga, analisis mengenai permasalahan daerahnya sangat penting sebagai basis pemecahan masalah atau solusi yang akan dilakukan menggunakan dana hasil alokasi pemerintah pusat (APBD). Identifikasi potensi dan permasalahan harus dikaji secara komprehensif untuk memudahkan analisis penyelesaian beserta dana yang dibutuhkan. Identifikasi juga memuat urgensi pentingnya program yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui *sister city* dengan negara lain.

2. Penyusunan Dana Alokasi APBD

Setelah melakukan identifikasi detail mengenai potensi beserta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah maka, selanjutnya dilakukan seleksi dana. Akan dilakukan identifikasi dan penyortiran apakah proyek paradiplomasi tersebut layak didanai menggunakan dana APBD atau tidak. Kriteria pendanaan bergantung pada urgensi permasalahan. Penyerapan dana juga tidak hanya bersumber dari APBN semata namun dari investasi pihak ketiga seperti perusahaan multinasional (MNC), organisasi internasional non-pemerintah (INGO), dan lain lain.

3. Audiensi dengan Pemerintah Pusat

APBD dialirkan dari ABPN yang disusun oleh pemerintah pusat. APBD disusun oleh badan legislatif yang diwakili oleh DPD. DPD akan melakukan audiensi

dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut.

4. Seleksi Proposal oleh Kementerian Dalam Negeri

Apabila proposal atau permohonan pemerintah daerah telah lolos tahap pengalokasian APBD maka akan difinalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku sponsor pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi. Kebijakan tersebut berisi keputusan apakah kementerian dalam negeri menyetujui untuk memberikan sponsor atas kegiatan paradiplomasi yang dilakukan. Apabila proposal proyek paradiplomasi sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut maka akan dilakukan penyetujuan oleh pemerintah pusat (Bappeda, 2018). Selanjutnya juga akan ditentukan pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dalam paradiplomasi daerah tersebut oleh kementerian dalam negeri bersama kementerian luar negeri (Bappeda, 2018). Pemerintah pusat akan membantu menentukan dan menghubungkan *stakeholder* paradiplomasi pemerintah daerah yang dapat berupa perusahaan multinasional, organisasi internasional, maupun perusahaan swasta.

3.3 Pentingnya Pemerintah Pusat dalam Efektivitas Paradiplomasi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses paradiplomasi, terutama dalam pelaksanaan program *sister city* tentunya dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah kurang dilibatkannya Pemerintah Pusat dalam prosesnya karena adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang menyebabkan Kota Semarang berhak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya, Kota Semarang mulai melibatkan Pemerintah Pusat dalam program *sister city*. Dalam kerjasamanya dengan Danida mengenai pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, kerjasama teknologi tersebut dapat terjadi dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) (Bappeda Kota Semarang, 2018). Selain itu, kerjasama dengan Kota Toyama juga berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kedua kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang konkrit bagi Kota Semarang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sangatlah berpengaruh dalam proses paradiplomasi Kota Semarang. Pemerintah Pusat memiliki kemampuan dan *network* yang lebih besar dalam mencari kesempatan kerjasama untuk Kota Semarang

sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal. Selain itu, dengan menggandeng Pemerintah Pusat, Kota Semarang dapat mendapatkan bantuan berupa dana APBD untuk membiayai program-program dan kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut jika lolos seleksi oleh Kementerian di tingkat pusat kemudian akan mendapatkan bantuan dari Lembaga Asing melalui Kementerian. Dengan demikian, proses kerjasama menjadi lebih terstruktur dan efektif.

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari *silent diplomacy* dan diplomasi searah, Pemerintah Pusat perlu dilibatkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat membantu Kota Semarang untuk melakukan promosi dan *sounding* ke luar sehingga diplomasi yang terjadi tidaklah hanya satu arah. Kemenlu dapat melibatkan Kota Semarang dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke kota-kota di luar negeri sehingga kerjasama dapat terus terjadi. Dengan melibatkan Pemerintah Pusat, keberhasilan paradiplomasi atau *sister city* yang dihasilkan tentunya akan lebih optimal, sehingga tidak akan terdapat *sleeping MoU*. Sebagai salah satu contohnya adalah ketidakberhasilan Kota Semarang dalam melakukan kerjasama *sister city* dengan Kota Beihai. Kota Semarang kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Kota Beihai karena tidak terdapat perkembangan yang berarti di hubungan kedua kota tersebut. Kota Semarang juga ingin mengurangi hal-hal yang berpotensi untuk menghasilkan apa yang dapat dikatakan sebagai *so-called silent diplomacy*.

Di samping itu, Pemerintah Pusat memiliki tujuan yang sama dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya saling memberikan keuntungan untuk satu sama lain. Sebagai satu kesatuan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling berkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anidu dkk, 2014: “*Implementasi Kerjasama Sister Schools Sma Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif Diplomasi Publik*”, dalam http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah,_Imam_Hanafi_and_Mangku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf.
- A. Epstein. Richard, 2013: “*Direct Democracy: GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE?*” dalam *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 34. http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34_3_819_Epstein.pdf
- A. Garner, Bryan (ed), 1999: *Black’s Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. n.d. *Banyaknya Angkatan Kerja di Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>.
- _____. *Jumlah Pekerja di Kota Semarang 2012-2014*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8>.
- _____. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 21 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>.
- _____. *Realisasi Volume Ekspor Non Migas Menurut Sektor*. Diakses 22 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/27>.
- Barston, R. P, 2006: “The Changing Nature of Diplomacy” dalam *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education.
- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006: “Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri”.
- Conyers, D, 1984: “Decentralization and Development: a Review of the Literature”, *Public Administration and Development*, Vol. 4.
- Ekins, Richard, 2009: “A Government for the People: The value of representative” dalam http://www.maxim.org.nz/site/DefaultSite/filesystem/documents/GP_Richard_Ekins_oct_09.pdf.
- Fathun, L. M., 2016:Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Hadi, Umar., 2007: “Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional”, *Tabloid Diplomasi* Edisi Desember 2007. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/55-desember-2007/535-diplomasi->

publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html._Diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015.

Held, D., dkk, 1999: *Global Transformations: Politics, Economics, and Culture*. Stanford: Stanford University Press.

Hermi S., 2013: "Prasyarat Keberhasilan Kerja Sama Sister Province: Studi Kasus Sister Province Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13, No. 2*.

Hidayat, Syarif., 2008: "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation*" dalam *Jurnal POELITIK Vol.1 No.1*.

Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 20 November 2016 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667.

Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.

Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016 <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.

Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.

Mathews, J. T., 1997: "Power Shift" dalam *Foreign Affairs Vol. 76, No. 1*.

Pemerintah Kota Semarang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. *Profil Kabupaten/Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2012: *Selayang Pandang Kota Semarang tahun 2012*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2013: *LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2014: *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pikiran Rakyat, 2016: *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016 <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri,

[http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA KEMENLU%020152019 FINAL DONE SK% 20MENLU pdf version.pdf.](http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA%20KEMENLU%20152019%20FINAL%20DONE%20SK%2020MENLU%20pdf%20version.pdf)

Mawhood P. (ed), 1987: “*Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*”, Chicheser: John Wiley & Sons.

Mukti, Yandu Setiya, 2013: “*Keberhasilan Kerjasama Sister Province Jawa Timur Dengan Gyeongsangnam-Do Korea Selatan Tahun 2006-2012*”, dalam <http://repository.upnyk.ac.id/5735/>

Niluh Wayan, Budiari, 2013: “*Faktor Pendorong Keberhasilan Kerjasama Sister Province Antara Pemerintah Jawa Timur Dengan Australia Barat (2007-2012)*”, <http://eprints.upnyk.ac.id/3267/>

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983: “*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*”, Washington D.C.: The World Bank.

Badan Pusat Statistik, 2016: *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses pada 21 November 2016 <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>

Fathun, L. M., 2016: Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.

Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 30 November 2016 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667

Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.

Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016. <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.

Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

Pemerintah Kota Semarang, 2014: *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pemerintah Kota Semarang, n.d. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*, Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Pikiran Rakyat, 2016: *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>.

Roy, S. L, 1993: *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali.

- Ruland, J., 1993: “*Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*”, Boulder: Westview Press.
- Seputar Semarang, n.d. *Kawasan Industri Semarang*. Diakses pada 29 November 2016. <http://seputarsemarang.com/tag/kawasan-industri/>.
- Setiadi, Rukuh, dan Samsul Ma'arif, 2009: "Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Riptek* 25-34.
- Sergunin, A. & Joenniemi, P., 2014. Paradiplomacy as a Sustainable Development Strategy: The Case of Russia's Arctic Subnational Actors. *Eurasia Border Review*, pp. 1-17.
- Sisk.Timothy D., et al., 2001: *Democracy At The Local Level*, International IDEA Handbook Series 4, Publications Office, International IDEA, Strömsborg, SE 103 34, Stockholm, Sweden.
- Smith, B.C., 1985: *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House
- Tavares, R., 2016: *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015: *Introduction to MICE Industry*. Diakses pada 30 November 2016. <http://msi.citu.tu.ac.th/uploads/news/file/20150820/en-bhlmp01347.pdf>
- Van der Pluijm, Rogier & Jan Melissen, 2007: *City Diplomacy: The Expanding Role of the Cities in International Politics*. Hague: Netherlands Institute of International Relations.
- Wang, J., 2005: “Localising Public Diplomacy: The Role of Sub-national Actors in Nation Branding” dalam *Place Branding, Vol. 2, 1*, Palgrave Macmillan Ltd.
- Windiani, R., 2013:” HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH: *Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.*, dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4934>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

BIODATA KETUA PENELITIAN

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan Gelar) : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M. Si
2. Jabatan Fungsional : Lektor
3. NIP : 19630422.198903.2.001
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 22 April 1963
5. Alamat Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A RT 01/RW 01
Bulusan
Tembalang Semarang Telp./Faks.
: 024 76482700
6. No. HP : 08156641333
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No. 13 Kampus
Undip Tembalang Semarang
8. Telp./Faks : 024 7465407 /024 7465405
9. Alamat e-mail : herminis@undip.ac.id atau
herminisq@yahoo.com
10. Mata Kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Politik
2. Teori Politik
3. Lembaga dan Proses Politik Indonesia
4. Kebijakan Publik
5. Azas-Azas Manajemen
6. Pancasila
7. Manajemen Program Pembangunan

II. Riwayat Pendidikan

| Program | S1 | S2 | S3 |
|-------------------------------|--|---|-----------|
| Nama Perguruan Tinggi | UNDIP | UGM | - |
| Bidang Ilmu | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Politik | - |
| Tahun Masuk | 1982 | 1991 | |
| Tahun Lulus | 1988 | 1995 | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Partisipasi Politik di Kabupaten | Proses dan Prospek Integrasi WNI Keturunan Cina di Singkawang | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Nama Pembimbing/Promotor | Temanggung I. Drs. Hartono II. Drs. A. Hamid Widodo III. Dra. Endang HOK, SU | I. Prof. Yahya II. Prof. Ichlasul Amal III. DR. Budi Winarno | |
|--------------------------|---|--|--|

III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
|-----|-------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2015 | Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang | Ketua | DIPA FISIP Undip |
| 2 | 2014 | Analisis Keterpilihan Denty Dalam Pemilu DPD RI 2014 | Ketua | DIPA FISIP Undip |
| 3 | 2013 | Implementasi Kebijakan Kerjasama Luae Negeri di Provinsi Jateng: Studi Kasus <i>Sister Province</i> Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina | Ketua | BNOPTN |
| 4 | 2012 | Analisis Perbandingan Peran Politik Senat AS dengan DPD Indonesia | Ketua | DIPA FISIP Undip |
| 5 | 2011 | Evaluasi Pencapaian Program MDGs Provinsi Jawa Tengah | Ketua | DIPA FISIP Undip |
| 6 | 2010 | Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010 | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 7 | 2010 | Evaluasi dan Pengembangan Model MBS di Wilayah Perdesaan di Jawa Tengah | Anggota | Balitbang Propinsi Jawa Tengah |
| 8 | 2010 | Implementasi UU NO. 14 Tahun 2008 Menuju Good Governance (Studi Kasus di Kabupaten Sragen dan Banjarnegara) | Anggota | Balitbang Propinsi Jawa Tengan |

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 tahun terakhir)

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2015 | "Pencegahan Praktek Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan Bebas: Origin Fraud dalam Industri Kerajinan Mebel Kayu di Jepara" | Ketua | DIPA FISIP Undip |
| 2 | 2015 | "Te mbakau Sebagai Identitas: Upaya Peningkatan Pengethun Petani Tembakau di Teanggung terhadap Fraud of Origin dalam Menghadapi Perdagangan Bebas" | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 3 | 2014 | Meningkatkan Pengetahuan Peserta Didik Dari Kalangan Masyarakat Bawah". Di Kelurahan Meteseh Kota Semarang | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 4 | 2014 | HI Mengajar : Upaya Peningkatan Taraf Pendidikan Kepemimpinan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 5 | 2013 | Peningkatan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tentang Peraturan Bekerja di Luar Negeri Serta Budaya Negara -Negara Tujuan | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 6 | 2012 | Pengabdian Kepada Masyarakat; pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Curug Mandiri Di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 7 | 2012 | Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Pengembangan Mangrove Education Center dan Mangrove Tourism Center di Kawasan Tapak | Anggota | DIPA FISIP Undip |

| | | | | |
|---|------|---|---------|---------------------|
| | | Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang" | | |
| 8 | 2011 | Pendampingan Pelaksanaan Administrasi Pembukuan Koperasi Serba Usaha Curug Mandiri di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal | Anggota | DIPA FISIP Undip |
| 9 | 2011 | Fasilitasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang | Anggota | DIPA FISIP Undip |

V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Penerbit/Jurnal |
|-----|-------|---|---|
| 1 | 2014 | Prasyarat Keberhasilan Kerjasama Sister Provice | Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13 No. 2 Agustus 2014 ISSN: 1411 - 8254 |
| 2 | 2014 | Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung | Majalah Forum Undip, Vol. 41 No. 1 Juni 2014, ISSN 0126-0731 |
| 3 | 2013 | Pemilukada Miskin Figur | Suara Merdeka |
| 4 | 2009 | Menakar Good Governance di Pemerintahan SBY – Boediono 2009 – 2014 | Forum FISIP Universitas Diponegoro |
| 5 | 2009 | Keterpurukan Pemilu DPD, 2009 | Suara Merdeka |

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 20 September 2018
Ketua Tim Pengusul,

Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si

BIODATA PENELITI

I. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan Gelar) : Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int.
Jabatan Fungsional dan Gol : Asisten Ahli/IIIb
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 1 Juli 1987
Nomor HP : 08125227048
Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedharto, SH No.13 Semarang
Telp/Fax : 024-7465405
Email : f.e.wahyudi@undip.ac.id,
f.e.wahyudi@gmail.com
Mata kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
2. Ekonomi Politik Internasional
3. Metode Penelitian HI
4. Globalisasi & Transnasionalisme
5. Organisasi & Administrasi Internasional

II. Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang | Institusi |
|----|--------------|--|
| 1 | S1 | Undergraduate Program of International Relations, Department of International Relations, Universitas Airlangga |
| 2 | S2 | Globalization & Strategic Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga |
| 3 | Diplôme DELF | Centre culturel et de Coopération Linguistique |
| 4 | Diplôme DELF | Institute Français d'Indonésie |

III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

| No | Tahun | Judul Penelitian |
|----|-------|--|
| 1 | 2009 | <i>Islamic Political Movements and Their Political Contestation in Indonesian institutionalized Democracy</i> |
| 2 | 2009 | Problem dan Solusi Perbatasan Indonesia : Kedaulatan, Integritas Bangsa, Pertahanan dan Sumber Daya Alam Strategis |
| 3 | 2010 | Studi Elektabilitas dan Popularitas Bakal Calon Walikota Surabaya |
| 4 | 2011 | <i>On Globalization and Culture: Cultural perception of Indonesian People in The Globalization era</i> |
| 5 | 2012 | <i>Moslem Women Perception on sharia and Khilafah perception in Indonesian Universities</i> |
| 6 | 2013 | Implementasi Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah Fujian |
| 7 | 2013 | Pemuda, Aktivisme Politik dan Media Baru |
| 8 | 2014 | Pengaruh Globalisasi terhadap Pandangan dan Aktivisme Kebudayaan Kelompok Pemuda di Jawa Tengah |
| 9 | 2015 | ISIS Vis a Vis Islamisme: Respon Gerakan Islam Transnasional terhadap Fenomena Kemunculan ISIS |

IV. Pengalaman Penelitian Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

| No | Tahun | Judul Artikel | Nama Jurnal, Vol, No, Hlm |
|----|-------|--|---|
| 1 | 2010 | Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi : Tinjauan Demokrasi Gelombang ke-4 (1991-2000) | Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Vol. 23 , Nomor 23 JuliSept 2010. ISSN 2086-7050 |
| 2 | 2010 | Jalan Curam Hegemoni Amerika Serikat | Jurnal Global dan Strategis. Vol. 3 – No. 1 / 2010-03. Surabaya: Centre for Strategic and Global Studies. |
| 3 | 2012 | Globaliksasi dan Desakralisasi Budaya: Tinjauan Dampak Globalisasi Terhadap Budaya | Majalah Pengembangan Ilmu Sosial “Forum”, Vol. 40 – No. 2. Oktober 2012, ISSN 0126-0731 |
| 4 | 2013 | Bridging between Transnational Islamism and Indonesian Islamic Tradition: The studies of Hizbut Tahrir Indonesia and Their Approach to The Ulema | 7th EuroSEAS Conference 2013 School of Social and Political Sciences – ISCSP University of Lisbon - Lisbon, 02-05 July 2013 |
| 5 | 2015 | Reviving the Silk Road between Fujian Province and the Central Java: contribution for future trade relationship | International Conference on “The Relation of 33 Indonesia-China: Dynamics, Problems dan Prospects” |
| 6 | 2015 | Teatrikal Makroekonomisme Globalisasi | Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14, No. 2 Tahun 2015 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPP.

BIODATA PENELITI

I. Identitas Diri

Nama : MOHAMAD ROSYIDIN, S. SOS, M.A.
Jenis Kelamin : Laki laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
NIP/NIK/Identitas Lainnya : 198507032015041001
NIDN : 0003078501
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 03-07-1985
E-mail : mohamad.rosyidin@undip.ac.id
Nomor Telepon / HP : 082133482323
Alamat Kantor : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK Jalan Prof. Soedarto, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 10 Nomor
Telepon / Faks : 082133482323

Lulusan yang telah dihasilkan : D3 = Orang
S1 = Orang
S2 = Orang
S3 = Orang

Mata Kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
2. Teori Hubungan Internasional
3. Metodologi Hubungan Internasional
4. Ekonomi Politik Internasional
5. Analisis Politik Luar Negeri
6. Studi Asia Tenggara
7. Studi Keamanan
8. Pengantar Filsafat Ilmu
9. Penulisan Akademik

II. Riwayat Pendidikan

| RINCIAN | S-1 | S-2 |
|-------------------------------|--|---|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Jember | Universitas Gadjah Mada |
| Bidang Ilmu | Hubungan internasional | Hubungan Internasional |
| Tahun Masuk - Lulus | 2004 - 2008 | 2012 - 2013 |
| Judul Skripsi/Tesis/Desertasi | Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation (JADSC) sebagai Institusionalisasi Identitas Kolektif Jepang dan Australia | Politik Luar Negeri dalam Suasana Dilema: Politik Keseimbangan India terhadap BRICS dan Amerika Serikat |
| Pembimbing / Promotor | Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Ph.D | Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.IP, M.A Rochdi Mohan Nazala, M.A, M. Lit |

III. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota | Pendanaan | |
|----|-------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Sumber dana | Jumlah |
| 1. | 2017 | Melampaui Regionalisme Asia Tenggara: ASEAN dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo | Ketua | Internal Fakultas | Rp. 15.200.000,00 |
| 2. | 2016 | Indonesia Mengglobal: Identitas Peran dan Aktivisme Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Susilo Bambang Yudhoyono | Ketua | Internal Fakultas | Rp. 5.750.000,00 |
| 3. | 2015 | Menjadi warga internasional yang baik? bantuan kemanusiaan indonesia kepada ukraina dalam konflik rusia-ukraina 2014-2015. | Ketua | Internal Fakultas | Rp. 7.370.000,00 |

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota | Pendanaan | |
|----|-------|---|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | Sumber dana | Jumlah |
| 1. | 2017 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal: S tandarisasi Produk Sirup Jahe Desa Tawang Sari. | Ketua | Internal Fakultas | Rp. 2.670.000,00 |

V. Publikasi Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Publikasi Jurnal | Penulis Utama/Anggota | Identitas Jurnal | Status Jurnal |
|----|-------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | 2016 | PENCEGAHAN PRAKTIK KEJAHATAN EKONOMI | Anggota | Jurnal Ilmu Sosial ISSN 2548-4893 Vol. 15/No. 1/ Tahun 2016 http://ejournal.undip.a | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |

| | | | | | |
|----|------|--|---------------|---|--|
| | | DALAM PERDAGANGAN BEBAS – ORIGIN FRAUD DALAM INDUSTRI MEBEL KAYU DI JEPARA | | c.... | i (Mempunyai i ISSN) |
| 2. | 2015 | Peran Swasta dalam Politik Luar Negeri: Bantuan Kemanusiaan Perusahaan Farmasi Indonesia ke Ukraina dan Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Ukraina | Penulis Utama | Analisis CSIS ISSN 1829-5908 Vol. 44/No. 4/ Tahun2015 https://www.researchgate... | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi i (Mempunyai i ISSN) |

VI. Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul | Penulis Utama/Anggota | ISBN | Jml Hal. | Penerbit |
|----|-------|--|-----------------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | 2017 | Indonesia dalam Pusaran Global: Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono | Penulis Utama | 9786026835390 | 263 | Pustaka Ilmu |

VII. Pemakalah Forum Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul | Forum | Status | Tingkat Forum |
|----|-------|--|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2016 | The Road to 'Niche Diplomacy': Comparing Indonesia's Middle Power Diplomacy under Susilo | International Conference on Social and Politics : The Challenges of Social | Pemakalah Biasa | Tingkat Internasional |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | Bambang Yudhoyono and Joko Widodo | Sciences in a Changing World Universitas Muhammadi yah Yogyakarta Yogyakarta | | |
|--|--|---|---|--|--|

VIII. HKI Dalam 5 Tahun Terakhir

Tidak ada riwayat.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPP.